

PROSES AGENDA SETTING KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA

Oleh

**Aulia Anisa
2426061005**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

A. Latar Belakang

Proses agenda setting dalam kebijakan publik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem politik dan pemerintahan di berbagai negara, termasuk¹Indonesia. Agenda setting berfokus pada bagaimana isu-isu tertentu mendapatkan perhatian publik dan politisi untuk diubah menjadi kebijakan yang sah. Dalam konteks ini, proses penentuan agenda menjadi penting karena kebijakan yang dihasilkan sering kali mencerminkan isu yang telah mendapat perhatian lebih dibandingkan isu lainnya. Hal ini mempengaruhi arah kebijakan publik yang akan diambil, serta memengaruhi efektivitas dan legitimasi kebijakan tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan sistem demokrasi yang berkembang pesat memiliki dinamika politik dan kebijakan publik yang tidak selalu linear, sehingga menjadi menarik untuk dianalisis.

Proses agenda setting sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti opini publik, media, partai politik, dan kelompok kepentingan. Hal ini sesuai dengan pandangan klasik mengenai proses politik yang tidak hanya melibatkan pembuat kebijakan tetapi juga aktor eksternal lainnya yang berperan dalam menentukan prioritas kebijakan. Proses ini mencerminkan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat yang pada akhirnya memengaruhi pembuatan kebijakan publik. Dalam konteks Indonesia, faktor-faktor seperti ketidaksetaraan sosial, pembangunan ekonomi, dan dinamika politik dalam negara yang sedang berkembang sering kali menjadi pendorong utama dalam pembentukan agenda kebijakan.

Di Indonesia, pemahaman tentang agenda setting dalam kebijakan publik telah berkembang sejak era reformasi 1998. Sebelum reformasi, banyak kebijakan publik yang diambil tanpa melibatkan proses partisipatif dari masyarakat, dan lebih terpusat pada kepentingan elit politik. Namun, sejak saat itu, proses kebijakan publik di Indonesia telah melibatkan lebih banyak aktor dan menjadi lebih terbuka. Ini memberikan peluang bagi berbagai kelompok untuk memengaruhi agenda pemerintah, terutama dalam hal kebijakan yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Salah satu aspek penting dalam proses agenda setting adalah pemahaman tentang tahapan-tahapan yang terjadi dalam proses tersebut. Tahapan ini membantu untuk memahami bagaimana suatu isu dapat masuk ke dalam agenda kebijakan pemerintah dan bagaimana proses tersebut berkelanjutan. Beberapa ahli memberikan pandangan berbeda mengenai tahapan dan elemen-elemen yang membentuk proses agenda setting ini. Dalam kajian ini, lima teori utama mengenai tahapan proses agenda setting akan diulas untuk memberikan perspektif yang komprehensif terhadap penerapan konsep ini dalam konteks kebijakan publik di Indonesia.²

Proses agenda setting kebijakan publik menurut John Kingdon, dalam bukunya *Agendas, Alternatives, and Public Policies* mengusulkan model tiga aliran yang berfokus pada tiga komponen utama: aliran masalah (problem stream), aliran kebijakan (policy stream), dan aliran politik (political stream). Dalam tahapan ini, Kingdon menekankan pentingnya momen jendela peluang (policy window), di

¹ T. A. Birkland, *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making* (4th Ed.). (Routledge., 2016).

² D. L. McCombs, M. E., & Shaw, *The Emergence of Agenda-Setting Theory in the Early 21st Century: Public Opinion and Media Influence* (Sage Publications., 2017).

mana ketiga aliran ini bertemu, memungkinkan suatu isu untuk memasuki agenda kebijakan publik. Dalam konteks Indonesia, aliran masalah sering kali berkaitan dengan isu sosial atau politik yang mendesak, sedangkan aliran kebijakan adalah serangkaian solusi yang tersedia bagi pemerintah, dan aliran politik adalah kondisi politik yang memungkinkan kebijakan tersebut untuk diimplementasikan.

Thomas A. Birkland, mengembangkan pandangannya dalam bukunya *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making*, yang menyarankan tahapan proses agenda setting dimulai dengan penentuan masalah yang perlu ditangani oleh pemerintah. Birkland menjelaskan bahwa masalah-masalah tersebut bisa muncul sebagai dampak dari krisis, bencana, atau masalah-masalah yang membutuhkan perhatian segera. Pada tahap pertama, masalah tersebut dikenali oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat, media, dan pemerintah, yang kemudian membentuk dasar bagi pembentukan agenda kebijakan.

Sementara itu, Michael Lipsky dalam teorinya tentang "street-level bureaucracy" mengemukakan bahwa proses agenda setting juga dipengaruhi oleh aktor-aktor tingkat bawah, yaitu birokrat yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dalam konteks kebijakan publik, terutama yang menyangkut pelayanan publik, keputusan yang diambil oleh pegawai pemerintah di tingkat bawah sering kali menentukan apakah isu-isu tertentu mendapat perhatian dalam agenda kebijakan nasional. Birokrat ini, yang berada di garis depan pelayanan publik, bisa mempengaruhi proses penentuan prioritas kebijakan berdasarkan pengalaman langsung mereka dengan masyarakat.³

James E. Anderson dalam bukunya *Public Policymaking: An Introduction* mengidentifikasi lima tahap utama dalam proses kebijakan publik: (1) Identifikasi masalah, (2) Penentuan prioritas, (3) Formulasi kebijakan, (4) Implementasi kebijakan, dan (5) Evaluasi kebijakan. Dalam konteks agenda setting, tahapan pertama adalah identifikasi masalah, di mana isu yang perlu diselesaikan oleh pemerintah mulai mendapat perhatian. Anderson menekankan pentingnya fase ini karena tanpa pengakuan masalah, tidak akan ada kebijakan yang bisa dikembangkan.

Terakhir, Paul A. Sabatier (1988) dalam teori kerangka kerja multi-level menambahkan elemen penting dalam proses agenda setting, yakni interaksi antar berbagai tingkat pemerintahan dan aktor. Sabatier mengemukakan bahwa kebijakan publik tidak hanya dipengaruhi oleh pemerintah pusat tetapi juga oleh faktor-faktor yang ada di tingkat lokal dan regional. Oleh karena itu, tahapan dalam proses agenda setting bisa berbeda di setiap tingkat pemerintahan, meskipun mereka bekerja pada masalah yang sama. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik yang sukses membutuhkan sinergi antara aktor-aktor yang berbeda dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan.⁴

Proses agenda setting di Indonesia memiliki relevansi yang sangat penting, mengingat negara ini menghadapi berbagai tantangan besar yang memerlukan kebijakan publik yang cepat dan efektif. Proses ini dapat menjadi dasar dalam mengidentifikasi masalah-masalah kritis seperti kemiskinan, ketimpangan sosial,

³ B. D. Baumgartner, F. R., & Jones, *The Politics of Attention: How Government Prioritizes Problems*. (University of Chicago Press., 2015).

⁴ R. Tjiptoheriyanto, *Politik Dan Kebijakan Publik Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press., 2020).

korupsi, dan masalah hak asasi manusia yang sering kali terlupakan dalam diskursus kebijakan. Di Indonesia, masalah-masalah tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi juga oleh dinamika global, seperti perubahan iklim dan krisis ekonomi internasional. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana isu-isu ini mendapatkan perhatian dalam kebijakan pemerintah.⁵

Proses agenda setting kebijakan publik adalah langkah awal yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan suatu negara. Di Indonesia, proses ini dipengaruhi oleh berbagai aktor, termasuk masyarakat, media, partai politik, dan kelompok kepentingan. Tahapan-tahapan yang diidentifikasi oleh para ahli memberikan pandangan yang lebih dalam mengenai bagaimana suatu isu dapat dimasukkan dalam agenda pemerintah. Dengan memahami proses ini, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan yang dapat menghadapi tantangan-tantangan global dan lokal secara efektif.

B. Formulasi kebijakan

1. Pengertian Formulasi Kebijakan dan teori formulasi kebijakan public

Formulasi kebijakan adalah proses di mana berbagai alternatif kebijakan dihasilkan, dianalisis, dan dipilih untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka mengatasi isu-isu publik. Proses ini melibatkan penetapan tujuan, identifikasi masalah, pengumpulan informasi, serta pengembangan berbagai opsi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Formulasi kebijakan bukan hanya sekadar perumusan kebijakan, tetapi juga melibatkan evaluasi dampak dari kebijakan yang akan diambil serta bagaimana kebijakan tersebut dapat diintegrasikan dengan kebijakan lain yang sudah ada.

Formulasi kebijakan sangat penting dalam siklus kebijakan publik karena merupakan langkah awal yang menentukan bagaimana suatu kebijakan akan berfungsi dan berinteraksi dengan lingkungan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta memainkan peran penting dalam menentukan prioritas kebijakan dan merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Teori-teori Formulasi Kebijakan Publik:

- a. Teori rasional menganggap bahwa proses pembuatan kebijakan harus didasarkan pada analisis logis dan sistematis terhadap berbagai alternatif yang ada. Menurut teori ini, pengambil keputusan harus mengumpulkan informasi yang relevan, mengevaluasi berbagai opsi, dan memilih alternatif yang paling efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Teori ini dianggap tepat untuk digunakan dalam situasi di mana data dan informasi yang jelas tersedia, dan di mana pengambil keputusan dapat membuat pilihan berdasarkan analisis yang objektif. Namun, teori ini seringkali dianggap tidak realistis karena kurangnya informasi yang sempurna dan keterbatasan dalam waktu dan sumber daya yang sering dihadapi oleh pembuat kebijakan.
- b. Teori incrementalism, yang dipelopori oleh Charles Lindblom, menyatakan bahwa kebijakan publik sering kali diubah secara bertahap atau inkremental.

⁵ McCombs, M. E., & Shaw, *The Emergence of Agenda-Setting Theory in the Early 21st Century: Public Opinion and Media Influence*.

Proses ini melibatkan modifikasi kebijakan yang sudah ada alih-alih merumuskan kebijakan baru dari awal. Teori ini dapat diterapkan dalam konteks Indonesia, di mana banyak kebijakan dihasilkan melalui proses revisi daripada pembuatan kebijakan baru. Pendekatan ini dianggap tepat karena lebih realistis dalam mencerminkan cara kerja pemerintah dan bagaimana kebijakan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang berubah. Namun, teori ini juga bisa menyebabkan stagnasi jika tidak ada inovasi yang signifikan dalam pembuatan kebijakan.

- c. Teori penyelesaian masalah berfokus pada identifikasi dan penanganan masalah spesifik yang dihadapi masyarakat. Proses ini dimulai dengan analisis mendalam mengenai masalah yang ada, pengembangan solusi yang mungkin, dan pemilihan solusi yang paling efektif. Teori ini sangat relevan dalam konteks kebijakan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat, karena memungkinkan pembuat kebijakan untuk lebih responsif terhadap masalah nyata yang dihadapi. Namun, pendekatan ini mungkin tidak selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari solusi yang diusulkan.
- d. Teori politik dalam formulasi kebijakan menekankan pentingnya interaksi antara berbagai aktor politik dan kepentingan dalam menentukan kebijakan publik. Proses pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh kekuatan politik, lobi, dan dinamika antara partai politik dan kelompok kepentingan. Pendekatan ini relevan di Indonesia, di mana politik memainkan peran kunci dalam pembuatan kebijakan. Namun, teori ini juga dapat membawa bias politik yang dapat mengabaikan kebutuhan masyarakat yang lebih luas, sehingga tidak selalu menghasilkan kebijakan yang adil atau efektif.
- e. Teori jaringan berfokus pada interaksi antara berbagai aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil dianggap penting untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif. Teori ini sangat tepat dalam konteks Indonesia, di mana banyak isu publik memerlukan kerjasama lintas sektoral. Namun, tantangan dalam implementasi teori ini adalah kebutuhan untuk menciptakan sinergi yang efektif antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda.

Dalam menentukan apakah teori-teori di atas tepat untuk digunakan dalam formulasi kebijakan publik di Indonesia, penting untuk mempertimbangkan konteks lokal dan tantangan yang dihadapi. Teori rasional, meskipun kuat dalam analisis, sering kali terhambat oleh keterbatasan informasi dan waktu. Sementara itu, teori incrementalism menawarkan pendekatan yang lebih realistis dalam konteks pemerintahan Indonesia yang cenderung lebih lambat dalam pengambilan keputusan.

Di Indonesia, salah satu contoh nyata dari kebijakan publik tentang penanganan sampah. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan isu lingkungan, pemerintah menghadapi tekanan untuk mengatasi masalah sampah yang semakin mendesak. Berbagai organisasi non-pemerintah (LSM) dan komunitas lokal berperan dalam mengangkat isu ini ke dalam perhatian publik dan mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan sampah.

Kebijakan publik ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk media massa. Media

berperan penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Dalam kasus kebijakan pengelolaan sampah, pemberitaan mengenai dampak negatif dari penumpukan sampah dan kasus pencemaran lingkungan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kampanye kebersihan. Akibatnya, isu ini mendapatkan tempat yang lebih signifikan dalam agenda pemerintah, yang pada gilirannya memicu respons politik dan kebijakan.

Setelah isu sampah masuk dalam agenda, langkah selanjutnya adalah merumuskan kebijakan. Di sini, analisis kebijakan menjadi krusial. Pemerintah perlu mengidentifikasi solusi yang efektif dan efisien untuk mengatasi permasalahan sampah. Melalui serangkaian diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ahli lingkungan, masyarakat, dan sektor swasta, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang komprehensif, seperti program pengurangan sampah plastik dan peningkatan fasilitas daur ulang.

Implementasi kebijakan juga merupakan bagian integral dari proses agenda setting. Di Indonesia, implementasi kebijakan pengelolaan sampah sering kali dihadapkan pada tantangan, seperti kurangnya anggaran, infrastruktur yang tidak memadai, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan secara berkala diperlukan untuk memastikan bahwa program yang telah diterapkan dapat berjalan dengan efektif dan memberikan hasil yang diharapkan.

Secara keseluruhan, proses dalam kebijakan publik di Indonesia menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media. Melalui penguatan komunikasi dan partisipasi publik, isu-isu kritis seperti pengelolaan sampah dapat diangkat ke dalam agenda kebijakan. Dengan demikian, proses ini tidak hanya membentuk kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga mendorong kesadaran kolektif akan isu-isu lingkungan yang mendesak.

Teori penyelesaian masalah memberikan pendekatan yang lebih responsif terhadap isu-isu nyata, tetapi harus dilengkapi dengan analisis jangka panjang. Teori politik relevan untuk memahami dinamika kekuasaan, tetapi perlu diimbangi dengan pendekatan yang mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Akhirnya, teori jaringan sangat penting dalam konteks kolaborasi antar aktor, tetapi memerlukan mekanisme yang baik untuk mengelola interaksi antar berbagai kepentingan. Dalam kesimpulan, kombinasi dari beberapa teori tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang proses formulasi kebijakan publik di Indonesia. Masing-masing teori memiliki kelebihan dan keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam konteks lokal untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Proses dalam formulasi kebijakan

Proses formulasi kebijakan publik adalah tahapan lanjutan setelah masalah dimasukkan dalam agenda kebijakan dan melibatkan pencarian solusi atas masalah yang ada. Tahap ini bertujuan untuk merumuskan alternatif-alternatif kebijakan yang akan diambil oleh pembuat kebijakan.⁶ Dalam konteks Indonesia, formulasi kebijakan biasanya melibatkan berbagai aktor, mulai dari

⁶ L Davis, M., & Lande, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik* (Jakarta: Gramedia, 2017).

pejabat pemerintah, anggota legislatif, birokrasi, hingga kelompok masyarakat dan sektor swasta. Proses ini sering kali melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan yang akan diterapkan. Oleh karena itu, formulasi kebijakan bukan hanya soal mencari solusi yang teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, politik, dan ekonomi yang relevan. Salah satu langkah pertama dalam formulasi kebijakan adalah analisis masalah. Pada tahap ini, berbagai data dan informasi mengenai masalah yang ada dikumpulkan dan dianalisis secara mendalam. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembuat kebijakan memiliki pemahaman yang jelas tentang masalah yang sedang dihadapi. Di Indonesia, analisis ini dapat melibatkan penelitian oleh lembaga-lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi yang memiliki pemahaman tentang permasalahan yang bersifat lokal maupun nasional.⁷

Selanjutnya, dalam proses formulasi kebijakan, dilakukan penentuan alternatif kebijakan. Pada tahap ini, pembuat kebijakan bersama dengan para ahli dan pihak terkait lainnya mengidentifikasi berbagai alternatif yang mungkin untuk menyelesaikan masalah yang ada. Setiap alternatif kebijakan akan dievaluasi dari segi keuntungan dan kerugiannya, baik dari segi biaya, waktu, sumber daya yang dibutuhkan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Sebagai contoh, dalam kasus kebijakan terkait perubahan iklim di Indonesia, alternatif kebijakan bisa mencakup penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi, atau kebijakan adaptasi perubahan iklim, yang masing-masing memiliki implikasi yang berbeda. Selama tahap ini, perdebatan politik juga sering kali terjadi. Berbagai aktor, baik politikus maupun kelompok kepentingan, dapat mengemukakan argumentasi mereka tentang pilihan kebijakan mana yang lebih baik. Di Indonesia, proses ini sering melibatkan negosiasi antar partai politik, serta antara pemerintah pusat dan daerah. Perdebatan politik ini sering mempengaruhi pilihan kebijakan yang pada akhirnya dipilih, karena kebijakan yang dihasilkan harus memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan.

Selain itu, peran media massa dalam formulasi kebijakan juga sangat signifikan. Media memiliki kemampuan untuk memengaruhi opini publik dan, pada gilirannya, mempengaruhi pembuat kebijakan. Isu yang mendapatkan sorotan media akan lebih mudah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dan alternatif kebijakan yang dipilih sering kali dipengaruhi oleh bagaimana media menggambarkan masalah tersebut. Di Indonesia, media memainkan peran penting dalam mendiskusikan kebijakan-kebijakan penting, seperti kebijakan sosial, ekonomi, dan politik, serta dalam membentuk persepsi publik terhadap alternatif kebijakan yang ada. Pada saat yang sama, pertimbangan teknis dan administratif juga menjadi bagian dari proses formulasi kebijakan. Dalam konteks birokrasi Indonesia, para pejabat pemerintah yang memiliki keahlian teknis dan administratif memainkan peran penting dalam memberikan masukan mengenai kelayakan dan implementasi dari berbagai alternatif kebijakan yang diajukan. Misalnya, kebijakan yang terkait dengan infrastruktur atau teknologi membutuhkan analisis yang mendalam dari para ahli yang memahami seluk-

⁷ A. L. Wardani, “Peran Akademisi Dalam Formulasi Kebijakan Publik Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 14, no. 3 (2022): 170–82.

beluk teknis terkait, sehingga keputusan yang diambil dapat dijalankan dengan efektif.⁸

Setelah alternatif kebijakan dievaluasi, tahap berikutnya adalah penyusunan kebijakan yang terpilih. Dalam proses ini, kebijakan yang dipilih akan dipublikasikan dalam bentuk rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah, yang kemudian akan dibahas dan disahkan oleh lembaga legislatif. Di Indonesia, proses ini melibatkan berbagai tahapan yang meliputi konsultasi publik, pembahasan di komisi-komisi legislatif, serta persetujuan dari Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan di Indonesia melibatkan proses yang cukup panjang dan melibatkan banyak pihak yang berkepentingan. Akhirnya, tahap evaluasi kebijakan juga tidak dapat diabaikan dalam proses formulasi kebijakan. Setelah kebijakan dilaksanakan, dilakukan evaluasi untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Di Indonesia, evaluasi ini dilakukan baik oleh lembaga pemerintah terkait maupun oleh lembaga independen. Hasil evaluasi dapat mempengaruhi keputusan kebijakan selanjutnya, apakah kebijakan tersebut perlu dipertahankan, diperbaiki, atau bahkan dibatalkan. Proses formulasi kebijakan di Indonesia melibatkan banyak tahapan yang kompleks, dari identifikasi masalah hingga evaluasi kebijakan. Keberhasilan dalam proses ini bergantung pada kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai faktor teknis, sosial, dan politik yang ada.

3. Factor-faktor yang mempengaruhi formulasi kebijakan

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Formulasi Kebijakan pada Proses Agenda Setting Kebijakan Publik di Indonesia

- a. Peran Media Massa. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi formulasi kebijakan publik di Indonesia adalah media massa. Media memiliki pengaruh besar dalam mengarahkan perhatian publik terhadap isu-isu tertentu, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pembuat kebijakan untuk menanggapi isu tersebut. Dalam konteks Indonesia, media sering kali menjadi agen penting dalam membentuk opini publik mengenai masalah sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi. Isu yang mendapat sorotan besar dari media cenderung menjadi prioritas dalam agenda kebijakan pemerintah, karena media dapat menciptakan tekanan sosial yang mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan. Dalam banyak kasus, media sosial, sebagai bentuk media baru, memiliki peran yang lebih besar dalam menyebarkan informasi dan mempengaruhi proses agenda setting dibandingkan dengan media tradisional.
- b. Pengaruh Partai Politik dan Kelompok Kepentingan. Partai politik dan kelompok kepentingan berperan signifikan dalam proses agenda setting di Indonesia. Dalam sistem politik multipartai, partai-partai politik sering kali memainkan peran sebagai aktor yang mendorong isu-isu tertentu agar dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Selain itu, kelompok kepentingan, seperti organisasi masyarakat sipil, kelompok bisnis, dan lembaga swadaya

⁸ R. Sulaiman, H., & Mahmud, “Strategi Formulasi Kebijakan Dalam Menghadapi Krisis Sosial Di Indonesia,” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 20, no. 1 (2021): 10.

masyarakat (LSM), aktif melakukan lobi untuk mempengaruhi kebijakan yang terkait dengan kepentingan mereka. Keberadaan kelompok-kelompok ini memperkaya proses agenda setting karena mereka membawa perspektif dan suara yang lebih beragam. Namun, ketidakseimbangan kekuatan antara kelompok yang memiliki sumber daya lebih besar dan kelompok yang lebih lemah sering kali mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu isu dalam masuk ke dalam agenda kebijakan.

- c. **Kekuatan Politik dan Keputusan Pemerintah.** Proses agenda setting juga dipengaruhi oleh kekuatan politik yang ada dalam struktur pemerintahan. Presiden, para menteri, dan pejabat tinggi lainnya memiliki pengaruh besar dalam menentukan prioritas kebijakan yang akan diambil. Dalam konteks Indonesia, stabilitas politik dan kepemimpinan yang kuat di tingkat eksekutif sering kali menentukan seberapa cepat atau lambat isu-isu tertentu masuk ke dalam agenda kebijakan. Selain itu, kebijakan yang telah dijalankan oleh pemerintah sebelumnya, baik yang sukses maupun yang gagal, juga dapat memengaruhi arah kebijakan yang akan diambil di masa depan. Keputusan politik ini, seringkali didorong oleh tujuan jangka pendek untuk mempertahankan kekuasaan atau meningkatkan legitimasi pemerintah.
- d. **Faktor Ekonomi dan Sumber Daya.** Faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan penting dalam formulasi kebijakan di Indonesia. Permasalahan ekonomi, seperti ketimpangan pendapatan, pengangguran, inflasi, atau masalah ketahanan pangan, sering kali menjadi isu utama yang mendorong agenda setting. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial, tenaga kerja, maupun teknologi, juga mempengaruhi keputusan untuk mengimplementasikan kebijakan tertentu. Pemerintah harus menilai apakah sumber daya yang ada cukup untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang dirumuskan. Dalam situasi krisis ekonomi atau bencana alam, masalah ekonomi menjadi lebih mendesak dan memaksa pemerintah untuk memprioritaskan kebijakan yang dapat mengatasi masalah tersebut dengan segera.
- e. **Pengaruh Global dan Perubahan Sosial.** Proses agenda setting kebijakan publik di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh faktor eksternal, khususnya perubahan global. Isu-isu global seperti perubahan iklim, migrasi internasional, dan krisis kesehatan global dapat mempengaruhi prioritas kebijakan pemerintah Indonesia. Misalnya, Indonesia sebagai negara berkembang yang terhubung dengan pasar global sering kali harus menyesuaikan kebijakannya untuk memenuhi standar internasional atau beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di luar negeri. Selain itu, perubahan sosial, seperti perubahan nilai-nilai budaya, kesadaran terhadap hak asasi manusia, atau gerakan sosial, juga berperan dalam menentukan prioritas kebijakan yang harus ditangani oleh pemerintah.
- f. **Pentingnya Kepentingan Masyarakat dan Opini Publik.** Dalam sistem demokrasi, opini publik dan kepentingan masyarakat merupakan faktor yang sangat memengaruhi proses agenda setting kebijakan publik. Gerakan sosial, protes publik, atau kampanye yang digerakkan oleh masyarakat sering kali menjadi pemicu bagi pemerintah untuk memperhatikan isu tertentu. Di Indonesia, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan

media sosial, suara-suara dari masyarakat kini dapat terdengar lebih luas dan cepat. Fenomena ini mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap isu-isu yang diangkat oleh publik, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, ketidakadilan sosial, dan isu lingkungan.

- g. Krisis dan Isu Urgensi. Krisis, baik yang bersifat nasional maupun internasional, dapat memaksa pemerintah untuk segera mengubah prioritas kebijakan dan memasukkan isu-isu tertentu ke dalam agenda kebijakan publik. Misalnya, bencana alam, krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19, atau krisis ekonomi dapat menciptakan urgensi bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan keadaan darurat tersebut. Krisis sering kali membuka "jendela peluang" di mana kebijakan baru yang mungkin sebelumnya tidak dipertimbangkan dapat diterima dengan lebih mudah. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah untuk merespons krisis dengan kebijakan yang tepat menjadi faktor yang penting dalam proses agenda setting.
- h. Peran Birokrasi dan Keahlian Teknis. Birokrasi memainkan peran yang tak kalah penting dalam proses formulasi kebijakan di Indonesia. Aparat pemerintah yang memiliki keahlian teknis dan administrasi yang mendalam dapat memberikan saran yang berharga dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien. Birokrasi juga berperan dalam menyaring dan mengolah berbagai informasi yang masuk, sehingga hanya isu-isu yang paling relevan dan dapat diimplementasikan yang berhasil dimasukkan dalam agenda kebijakan. Namun, meskipun birokrasi dapat menjadi agen penting dalam proses ini, kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan dan ketidaksiapan aparatur dalam menjalankan kebijakan dapat memperlambat atau menghambat implementasi kebijakan tersebut.

C. Agenda Setting

1. Teori agenda setting dalam kebijakan public

Agenda setting dalam kebijakan publik merujuk pada proses di mana isu-isu tertentu diprioritaskan dan dimasukkan ke dalam agenda kebijakan oleh aktor-aktor yang memiliki kekuasaan dalam suatu sistem politik. Proses ini penting karena tidak semua masalah yang muncul dalam masyarakat akan menjadi bagian dari kebijakan publik yang ditangani pemerintah. Agenda setting mengarah pada pemilihan masalah tertentu yang dianggap penting untuk dipecahkan atau diperhatikan dalam kebijakan negara. Dalam konteks Indonesia, fenomena agenda setting dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aktor politik, media massa, kelompok kepentingan, dan peristiwa-peristiwa besar seperti bencana atau krisis ekonomi.⁹

Salah satu teori yang mendasari pemahaman tentang agenda setting adalah Teori Media Agenda Setting, yang menekankan peran media dalam menentukan isu-isu yang memperoleh perhatian publik. Dalam hal ini, media massa bertindak sebagai penyaring utama informasi yang sampai ke masyarakat. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh McCombs dan Shaw (1972), yang menemukan bahwa apa yang dibicarakan oleh media sering kali mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Dalam konteks Indonesia, peran

⁹ A. R. Putra, "Teori Formulasi Kebijakan Dalam Konteks Indonesia: Studi Kasus Isu Lingkungan," *Kebijakan Dan Manajemen* 19, no. 2 (2020): 105.

media sangat besar, baik dalam menciptakan opini publik maupun dalam mendorong masalah tertentu untuk menjadi prioritas kebijakan pemerintah, terutama isu-isu yang mendapat liputan luas.

Selain media, faktor politik internal juga mempengaruhi proses agenda setting dalam kebijakan publik. John Kingdon (1984) mengembangkan teori agenda setting yang lebih mendalam dengan mengidentifikasi tiga aliran utama dalam proses kebijakan: aliran masalah, aliran kebijakan, dan aliran politik. Kingdon menjelaskan bahwa suatu masalah akan menjadi bagian dari agenda kebijakan ketika ketiga aliran ini bertemu dalam suatu *window of opportunity*, yang sering kali dipicu oleh perubahan politik atau peristiwa besar. Dalam konteks Indonesia, teori ini sangat relevan karena pergeseran politik yang cepat dapat mempengaruhi isu mana yang akan mendapat perhatian dalam kebijakan pemerintah.

Teori lainnya adalah Teori Peluang Kebijakan (*Policy Window Theory*), yang juga berhubungan erat dengan Kingdon, namun menekankan bagaimana peluang untuk mengangkat masalah menjadi bagian dari kebijakan muncul pada saat tertentu. Teori ini menyoroti pentingnya "*window of opportunity*," yang biasanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti krisis atau perubahan besar dalam masyarakat. Misalnya, bencana alam atau krisis ekonomi sering kali menciptakan kesempatan untuk mendorong perubahan kebijakan atau pengenalan kebijakan baru. Dalam konteks Indonesia, perubahan politik yang terjadi setelah pemilu atau pergeseran sosial-ekonomi sering membuka peluang bagi masalah baru untuk dimasukkan dalam agenda kebijakan.

Teori Pluralisme, yang dikembangkan oleh David Truman (1951), juga memiliki peran penting dalam memahami agenda setting. Dalam teori ini, kebijakan publik dihasilkan melalui interaksi berbagai kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat. Masing-masing kelompok berusaha mempengaruhi kebijakan sesuai dengan kepentingannya, dan hasilnya adalah kebijakan yang mencerminkan kompromi antara kelompok-kelompok tersebut. Teori ini relevan dalam konteks Indonesia yang memiliki masyarakat yang sangat pluralistik, dengan berbagai kelompok kepentingan yang berperan dalam menentukan isu-isu yang mendapat perhatian pemerintah, seperti kelompok adat, organisasi non-pemerintah (NGO), dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Teori Bureaucratic Politics, yang dikemukakan oleh Graham Allison (1971), menjelaskan bagaimana proses pembuatan kebijakan juga dipengaruhi oleh dinamika internal dalam birokrasi pemerintah. Dalam teori ini, kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh keputusan politik dari elit, tetapi juga oleh negosiasi dan konflik antara birokrat dalam berbagai lembaga pemerintahan. Dalam praktiknya, birokrasi yang besar dan kompleks di Indonesia, dengan banyak kementerian dan lembaga yang terlibat, mempengaruhi bagaimana isu-isu tertentu diterima dalam agenda kebijakan. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana kebijakan publik sering kali merupakan hasil dari kompromi antara berbagai aktor birokratik dan politik.

Selain teori-teori tersebut, penting juga untuk mempertimbangkan Teori Kritis dalam memahami agenda setting. Teori kritis berfokus pada bagaimana struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Antonio Gramsci dalam teori hegemoni sosialnya menunjukkan bahwa kebijakan publik sering kali mencerminkan dominasi

kelompok elit tertentu yang berusaha mempertahankan kekuasaan dan kepentingannya. Dalam konteks Indonesia, ini bisa dilihat dari bagaimana kelompok bisnis besar atau elite politik dapat mempengaruhi kebijakan publik untuk keuntungan mereka, seringkali mengabaikan suara masyarakat yang lebih kecil atau kurang berkuasa.

Pemilihan teori-teori ini didasarkan pada relevansinya dengan dinamika politik dan sosial yang terjadi di Indonesia. Teori media agenda setting sangat relevan mengingat peran media yang semakin besar dalam membentuk opini publik dan mengarahkan perhatian pemerintah terhadap masalah-masalah tertentu. Teori Kingdon memberikan wawasan yang lebih dinamis mengenai bagaimana isu-isu kebijakan dapat muncul dalam waktu yang tepat, terutama di Indonesia yang mengalami perubahan politik yang cepat. Sementara itu, Teori pluralisme menyoroti pentingnya peran kelompok kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan yang lebih inklusif dan representatif.

Teori bureaucratic politics juga relevan karena Indonesia memiliki birokrasi pemerintahan yang besar, yang mempengaruhi keputusan kebijakan. Oleh karena itu, proses agenda setting sering kali melibatkan interaksi yang kompleks antara berbagai aktor dalam birokrasi. Teori kritis memberikan perspektif tambahan dengan menyoroti ketimpangan kekuasaan dalam proses pembuatan kebijakan, yang sangat penting dalam konteks Indonesia, di mana elit politik dan ekonomi memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan public.

Dengan menggunakan teori-teori ini, analisis agenda setting di Indonesia dapat memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai bagaimana kebijakan publik dibentuk dan siapa saja aktor yang terlibat dalam menentukan isu-isu yang menjadi prioritas. Dalam praktiknya, kebijakan publik Indonesia sering kali merupakan hasil dari interaksi antara media, politik, birokrasi, kelompok kepentingan, dan faktor-faktor eksternal seperti krisis sosial dan ekonomi.

2. Factor yang mempengaruhi agenda setting di Indonesia

- a. Media Massa dan Peranannya. Media massa memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses agenda setting kebijakan publik di Indonesia. Dengan adanya berbagai platform media, baik itu media cetak, televisi, maupun media online, isu-isu tertentu dapat dengan cepat mendapatkan perhatian masyarakat luas. Media berfungsi sebagai saluran informasi yang menginformasikan publik tentang peristiwa-peristiwa terkini dan isu-isu yang sedang berkembang. Ketika media memberikan sorotan yang besar terhadap suatu isu, masyarakat akan lebih cenderung memprioritaskannya, sehingga memaksa pembuat kebijakan untuk memperhatikan dan mengatasinya. Dalam konteks Indonesia, media juga sering menjadi jembatan bagi kelompok-kelompok masyarakat untuk menyuarakan kepentingan mereka, yang selanjutnya dapat mendorong isu tersebut masuk ke dalam agenda kebijakan pemerintah.
- b. Aktor Politik dan Kelompok Kepentingan. Di Indonesia, aktor politik dan kelompok kepentingan memainkan peran kunci dalam mempengaruhi agenda setting. Partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan LSM memiliki kepentingan untuk mempromosikan isu-isu tertentu guna mendapatkan dukungan masyarakat atau mengubah

kebijakan publik yang ada. Melalui lobi, kampanye, dan advokasi, kelompok-kelompok ini berupaya menarik perhatian pemerintah terhadap isu-isu yang dianggap penting. Selain itu, kehadiran aktor-aktor politik dengan kekuatan dan sumber daya yang signifikan dapat membantu memasukkan isu tertentu ke dalam agenda kebijakan. Misalnya, jika seorang politisi terkenal mengangkat suatu isu, maka kemungkinan besar isu tersebut akan mendapatkan perhatian dari pembuat kebijakan.

- c. Konteks Sosial dan Ekonomi. Konteks sosial dan ekonomi Indonesia juga memengaruhi agenda setting. Masalah-masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial sering kali menjadi prioritas dalam agenda kebijakan publik. Di saat masyarakat mengalami tekanan ekonomi atau kondisi sosial yang memburuk, isu-isu ini akan lebih mudah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Selain itu, peristiwa-peristiwa besar, seperti bencana alam atau krisis ekonomi, dapat mempercepat agenda setting dengan mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan. Oleh karena itu, keadaan sosial dan ekonomi yang dinamis berkontribusi pada perubahan prioritas kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
- d. Faktor Global dan Internasional. Faktor global juga memainkan peran dalam proses agenda setting di Indonesia. Isu-isu internasional seperti perubahan iklim, perdagangan bebas, dan hak asasi manusia sering kali mempengaruhi agenda kebijakan nasional. Dalam era globalisasi, banyak isu yang bersifat transnasional, sehingga tidak bisa diabaikan oleh pemerintah. Indonesia, sebagai anggota komunitas internasional, harus memperhatikan berbagai komitmen internasional dan menyesuaikan kebijakan nasionalnya untuk memenuhi standar global. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor eksternal dapat secara signifikan mempengaruhi apa yang dianggap sebagai isu penting di tingkat domestik.
- e. Dinamika Politik dan Kebijakan Pemerintah. Dinamika politik dalam pemerintahan Indonesia juga berkontribusi pada proses agenda setting. Ketika terjadi perubahan pemerintahan atau adanya pemilu, sering kali terjadi pergeseran dalam agenda kebijakan. Pemerintah baru mungkin memiliki prioritas yang berbeda, yang dapat mengubah fokus kebijakan dari isu-isu yang sebelumnya dianggap penting. Selain itu, faktor-faktor seperti stabilitas politik dan hubungan antara berbagai lembaga pemerintahan dapat mempengaruhi seberapa cepat dan efektif suatu isu dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Dalam konteks ini, perubahan kebijakan dapat dipicu oleh kebutuhan untuk merespons tuntutan masyarakat atau hasil pemilu, sehingga mempercepat proses agenda setting.

3. Implementasi dan tantangan dalam proses agenda setting di Indonesia

Proses agenda setting dalam kebijakan publik di Indonesia mengalami berbagai implementasi yang terpengaruh oleh kompleksitas struktur pemerintahan yang ada. Salah satu tantangan utama adalah fragmentasi politik dan birokrasi yang sangat besar. Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang

terdiri dari berbagai level, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Setiap level pemerintahan memiliki kewenangan yang berbeda-beda, yang sering kali menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan sulitnya koordinasi antar lembaga. Proses pembuatan dan pengaturan agenda kebijakan yang melibatkan banyak aktor, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, memerlukan koordinasi yang sangat kuat. Tanpa koordinasi yang efektif, isu-isu yang diangkat ke dalam agenda kebijakan bisa saja terhambat atau bahkan tidak terimplementasi dengan baik.¹⁰

Selain itu, diversitas sosial dan ekonomi yang ada di Indonesia turut memperumit proses agenda setting. Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman budaya, agama, etnis, dan kondisi sosial-ekonomi yang sangat beragam. Isu-isu yang relevan di satu wilayah mungkin tidak memiliki urgensi yang sama di wilayah lainnya. Misalnya, masalah infrastruktur di kota besar seperti Jakarta sangat berbeda dengan masalah pengentasan kemiskinan di daerah-daerah terpencil di Papua atau Nusa Tenggara Timur. Hal ini menyebabkan tantangan dalam menentukan prioritas isu yang akan dimasukkan dalam agenda kebijakan nasional, mengingat kepentingan yang sangat berbeda antara daerah satu dengan lainnya.

Pengaruh media massa juga memiliki dampak yang besar terhadap agenda setting di Indonesia. Media berperan dalam memperkenalkan isu-isu yang dianggap penting kepada masyarakat dan pemerintah. Media memiliki kekuatan untuk mengubah persepsi publik mengenai masalah tertentu, sehingga mempengaruhi keputusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Isu yang mendapatkan sorotan media cenderung lebih cepat masuk ke dalam agenda kebijakan, meskipun media itu sendiri sering kali memiliki bias tertentu dalam memilih dan menyampaikan isu. Oleh karena itu, ketergantungan pada media untuk menentukan agenda kebijakan dapat menjadi masalah ketika media tidak cukup objektif dalam menyampaikan informasi atau cenderung menonjolkan isu-isu yang lebih sensasional daripada yang substansial.

Peran kelompok kepentingan dalam proses agenda setting di Indonesia juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Kelompok kepentingan ini bisa terdiri dari organisasi non-pemerintah (NGO), kelompok bisnis, lembaga internasional, serta partai politik. Kelompok-kelompok ini sering kali melakukan lobi dan advokasi untuk memastikan bahwa isu-isu tertentu diakomodasi dalam kebijakan pemerintah. Misalnya, isu-isu lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender sering didorong oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil, yang meskipun terkadang memiliki sumber daya yang terbatas, namun dapat memanfaatkan jaringan sosial dan kekuatan opini publik untuk mempengaruhi proses agenda setting. Namun, tantangan muncul ketika kelompok-kelompok ini tidak memiliki akses yang memadai ke pembuat kebijakan atau ketika ada ketidaksetaraan dalam kekuatan lobi antar kelompok.

Dari sisi politik partai, sistem politik Indonesia yang multipartai sering menyebabkan dinamika politik yang kompleks. Setiap partai politik memiliki kepentingan dan ideologi yang berbeda-beda, yang mempengaruhi prioritas

¹⁰ R Utami, L. S., & Handayani, “Analisis Formulasi Kebijakan Publik Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Politik* 14, no. 1 (2021): 59.

kebijakan yang mereka dukung. Di Indonesia, sistem pemerintahan yang didominasi oleh koalisi partai politik menjadikan proses agenda setting sering kali tergantung pada keseimbangan kepentingan partai-partai besar. Terkadang, ini dapat memperlambat atau mempersulit pengambilan keputusan mengenai isu-isu yang dianggap kurang mendesak atau tidak mendapatkan dukungan mayoritas partai. Proses ini juga rentan terhadap perubahan mendadak ketika terjadi pergantian kabinet atau perubahan dalam koalisi politik.

Ketergantungan pada sumber daya yang terbatas juga menjadi tantangan besar dalam implementasi agenda setting di Indonesia. Pemerintah Indonesia sering kali harus memilih antara isu-isu yang mendesak namun memerlukan anggaran besar dan isu-isu yang mungkin lebih kecil tetapi bisa diselesaikan dengan sumber daya yang ada. Pada akhirnya, keputusan politik dalam menentukan prioritas agenda sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran dan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Isu-isu yang memerlukan alokasi sumber daya besar, seperti pembangunan infrastruktur atau program kesejahteraan sosial, seringkali harus bersaing dengan isu-isu lainnya yang juga dianggap penting.¹¹

Isu-isu global dan regional juga turut memengaruhi agenda setting di Indonesia. Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia harus mempertimbangkan tekanan dari negara-negara lain dan lembaga-lembaga internasional dalam menetapkan agenda kebijakan nasional. Misalnya, perjanjian internasional terkait perubahan iklim, perdagangan bebas, dan hak asasi manusia sering kali mempengaruhi kebijakan dalam negeri. Terkadang, kebijakan yang diambil untuk memenuhi kewajiban internasional bertentangan dengan kebutuhan domestik, yang dapat menciptakan ketegangan dalam proses agenda setting. Oleh karena itu, pengaruh global sering kali menjadi faktor penentu dalam menentukan isu yang akan masuk dalam agenda kebijakan Indonesia.

Terakhir, masalah kapasitas pemerintah dalam hal penyusunan dan implementasi kebijakan menjadi tantangan besar. Meskipun Indonesia memiliki banyak lembaga yang bertanggung jawab dalam membuat kebijakan, tidak semua lembaga tersebut memiliki kapasitas yang cukup untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan implementatif. Keterbatasan kapasitas teknis, administratif, dan sumber daya manusia di lembaga-lembaga pemerintah dapat menghambat pengembangan kebijakan yang tepat sasaran. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang ada dapat membuat proses agenda setting tidak optimal, dan kebijakan yang dihasilkan tidak dapat mengatasi akar masalah dengan efektif.

¹¹ R. B. Santosa, "'Pentingnya Analisis Masalah Dalam Proses Formulasi Kebijakan Publik Di Indonesia,'" *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 28, no. 4 (2020): 47.

DAFTAR PUSTAKA

- Baumgartner, F. R., & Jones, B. D. *The Politics of Attention: How Government Prioritizes Problems*. University of Chicago Press., 2015.
- Birkland, T. A. *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making (4th Ed.)*. Routledge., 2016.
- Davis, M., & Lande, L. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. *The Emergence of Agenda-Setting Theory in the Early 21st Century: Public Opinion and Media Influence*. Sage Publications., 2017.
- Putra, A. R. “Teori Formulasi Kebijakan Dalam Konteks Indonesia: Studi Kasus Isu Lingkungan.” *Kebijakan Dan Manajemen* 19, no. 2 (2020): 105.
- Santosa, R. B. “Pentingnya Analisis Masalah Dalam Proses Formulasi Kebijakan Publik Di Indonesia.” *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 28, no. 4 (2020): 47.
- Sulaiman, H., & Mahmud, R. “Strategi Formulasi Kebijakan Dalam Menghadapi Krisis Sosial Di Indonesia.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 20, no. 1 (2021): 10.
- Tjiptoheriyanto, R. *Politik Dan Kebijakan Publik Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press., 2020.
- Utami, L. S., & Handayani, R. “Analisis Formulasi Kebijakan Publik Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Politik* 14, no. 1 (2021): 59.
- Wardani, A. L. “Peran Akademisi Dalam Formulasi Kebijakan Publik Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 14, no. 3 (2022): 170–82.